

Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi melalui Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif pada Kondisi Keterbatasan Akses (Studi Kasus Daerah 3T)

Rudolf. Kempa^{1✉}, Sefanya Sairiltiata²
(1,2) Administrasi Pendidikan, Universitas Pattimura, Indonesia

✉ Corresponding author
manajemenpendidikan13697@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola kelembagaan, khususnya pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, informasi, dan komunikasi. Kondisi tersebut seringkali mempengaruhi efektivitas proses pengambilan keputusan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pada kondisi keterbatasan akses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi pola partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif melalui forum musyawarah, keterlibatan pemangku kepentingan, serta keterbukaan informasi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, penerapan monitoring dan evaluasi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi wilayah 3T memperkuat kontrol sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola partisipatif yang adaptif terhadap keterbatasan akses dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi kelembagaan di wilayah 3T.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengambilan Keputusan Partisipatif, Tata Kelola, Daerah 3T.

Abstract

This research is motivated by the importance of strengthening accountability and transparency in institutional governance, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions that face limited access to infrastructure, information, and communication. These conditions often impact the effectiveness of decision-making processes and stakeholder engagement in institutional governance. This study aims to analyze the role of participatory decision-making mechanisms in strengthening accountability and transparency under conditions of limited access. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, then analyzed descriptively and analytically to identify patterns of stakeholder participation in the decision-making process. The results indicate that participatory decision-making mechanisms through deliberation forums, stakeholder engagement, and information disclosure can improve institutional transparency and accountability. Furthermore, the implementation of simple monitoring and evaluation systems tailored to the conditions of 3T regions strengthens social control and public trust in institutions. These findings suggest that a participatory governance approach that adapts to limited access can be an effective strategy for strengthening institutional accountability and transparency in 3T regions.

Keyword: Accountability, Transparency, Participatory Making, Governance, 3T Regions.

Article info

Submitted: April 29, 2026; Accepted: Juni 26, 2026; Published: Juni 26, 2026

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik (good governance). Dalam institusi publik maupun pendidikan, kedua prinsip ini berperan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menurut Mark Bovens, akuntabilitas merupakan mekanisme yang memungkinkan aktor publik

menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai dan mengevaluasinya, Bovens (2007:50). Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencakup proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, implementasi akuntabilitas dan transparansi sering menghadapi kendala, terutama pada institusi yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Kondisi ini umum ditemukan pada organisasi publik di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur komunikasi yang terbatas. Penelitian Jonathan Fox menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga berpotensi melemahkan system akuntabilitas institusional, fox (2015:49)

Mekanisme pengambilan keputusan partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Archon Fung, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat transparansi melalui proses deliberatif yang melibatkan berbagai pihak, Fung, (2015:51).

Namun demikian, pada organisasi dengan keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya manusia, penerapan mekanisme partisipatif sering belum berjalan optimal. Keterbatasan sarana komunikasi, rendahnya literasi informasi, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama. Penelitian Anuradha Joshi dan Peter Houtzager menunjukkan bahwa tanpa desain partisipasi yang adaptif terhadap kondisi lokal, penguatan akuntabilitas cenderung tidak berkelanjutan, Joshi & Houtzager (2012:152).

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya. Fokus kajian mencakup praktik tata kelola organisasi, tingkat keterlibatan pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan.

Dalam kajian teoritik, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Mark Bovens, akuntabilitas merupakan hubungan sosial yang menuntut aktor menjelaskan serta mempertanggungjawabkan keputusan kepada forum yang berwenang, Bovens (2007:50). Prinsip ini berkaitan erat dengan transparansi yang menekankan keterbukaan informasi kepada publik. Penelitian Stephan Grimmelikhuijsen dan Albert Meijer menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi publik, Grimmelikhuijsen & Meijer (2014:140).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pengambilan keputusan partisipatif pada organisasi dengan keterbatasan akses. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan organisasi, staf, dan pemangku kepentingan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen organisasi seperti laporan kegiatan, notulen rapat, dan dokumen monitoring dan evaluasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen organisasi. Simpulan penelitian ditarik secara induktif untuk memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi, John W. Creswell, (2018 :45), Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, (2014:45) Robert K. Yin (2018:17).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pengambilan keputusan partisipatif pada organisasi yang berada dalam kondisi keterbatasan akses. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan organisasi, anggota atau staf lembaga, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, notulen rapat, kebijakan organisasi, dan dokumen monitoring dan evaluasi yang relevan dengan sistem tata kelola organisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap proses pengambilan keputusan, serta analisis dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi yang berlangsung dalam organisasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi. Untuk memastikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber

dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen organisasi. Selanjutnya, simpulan penelitian ditarik secara induktif berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman konseptual mengenai mekanisme pengambilan keputusan partisipatif yang efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan akses, Creswell, (2018: 41;) Miles, Huberman, & Saldaña, (2014:12) Yin, (2018:15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi pada organisasi dengan keterbatasan akses masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan informasi dan lemahnya sistem dokumentasi. Proses pengambilan keputusan masih cenderung bersifat top-down, sehingga partisipasi pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi belum berjalan optimal.

Transparansi umumnya hanya terbatas pada penyampaian hasil keputusan tanpa penjelasan mengenai proses dan pertimbangannya. Kondisi ini menyebabkan pemahaman anggota organisasi terhadap proses perumusan kebijakan menjadi terbatas. Penelitian Haryanto menunjukkan bahwa distribusi informasi yang tidak merata dapat melemahkan praktik transparansi dalam organisasi publik, Haryanto (2021:112).

Selain itu, akuntabilitas masih berfokus pada pelaporan administratif seperti laporan kegiatan dan keuangan, sementara evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan belum dilakukan secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Wibowo yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam banyak organisasi masih dipahami sebatas pelaporan administratif tanpa integrasi dengan prinsip partisipasi dan transparansi, Pratama & Wibowo (2020:67).

Implementasi Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan mendorong keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas komunikasi dan kepercayaan dalam organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryadi yang menyatakan bahwa mekanisme partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan legitimasi kebijakan, Suryadi (2019:145), serta Rahman yang menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan memperkuat akuntabilitas melalui proses deliberatif bersama, Rahman (2022:98).

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses komunikasi dan rendahnya kapasitas sebagian anggota organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif agar mekanisme partisipatif dapat berjalan efektif dalam kondisi keterbatasan akses.

Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Mendukung Akuntabilitas

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan organisasi berjalan secara akuntabel dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian organisasi telah menerapkan monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya masih sederhana dan belum terintegrasi secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Santoso menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi serta mendukung proses pembelajaran kelembagaan secara berkelanjutan, Santoso (2021:54).

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi dengan keterbatasan akses, penelitian ini menemukan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana namun sistematis lebih efektif diterapkan karena tetap memungkinkan evaluasi kebijakan meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

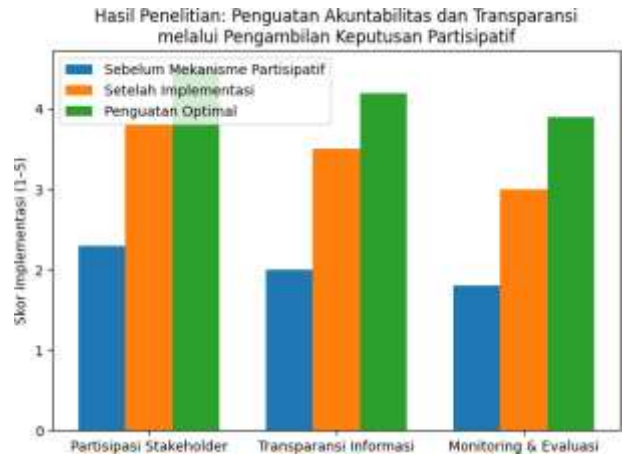
Model Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penguatan akuntabilitas dan transparansi organisasi dapat dilakukan melalui model pengambilan keputusan partisipatif yang mengintegrasikan keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang sederhana namun efektif. Model ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

Model tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas organisasi tidak hanya bergantung pada pelaporan administratif, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Nugroho yang menyatakan bahwa integrasi transparansi, partisipasi, dan evaluasi organisasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola serta memperkuat akuntabilitas institusi publik, Putri & Nugroho (2023:121). Dengan demikian, model pengambilan keputusan partisipatif yang adaptif dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi.



Gambar Diagram 1



Gambar 2

Diagram menggambarkan perbandingan tiga kondisi penelitian:

- 1) Sebelum mekanisme partisipatif diterapkan
- 2) Setelah implementasi mekanisme pengambilan keputusan partisipatif
- 3) Kondisi penguatan optimal akuntabilitas dan transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif memberikan peningkatan yang signifikan terhadap indikator partisipasi stakeholder, transparansi informasi, serta sistem monitoring dan evaluasi organisasi. Sebelum penerapan mekanisme partisipatif, tingkat partisipasi pemangku kepentingan masih berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata di bawah 2,5. Setelah implementasi mekanisme partisipatif melalui forum musyawarah, konsultasi pemangku kepentingan, serta penyampaian informasi secara terbuka, terjadi peningkatan skor hingga kisaran 3,0–3,8. Pada tahap penguatan optimal, indikator transparansi dan akuntabilitas menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dengan skor rata-rata di atas 4,0. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta efektivitas sistem monitoring dan evaluasi organisasi.



Gambar Diagram 3

Diagram tersebut menggambarkan model mekanisme pengambilan keputusan partisipatif yang dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi pada kondisi keterbatasan akses informasi, teknologi, dan sumber daya. Model ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, bukan secara hierarkis atau *top-down*.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan organisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi nyata. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap awal merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, Ansell & Gash, (2008:48).

Tahap berikutnya meliputi forum partisipatif, pengambilan keputusan bersama, implementasi transparan, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Proses ini membentuk siklus tata kelola yang berkelanjutan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih legitim, transparan, dan akuntabel, Archon Fung, (2015:55) Nancy C. Roberts (2004:75) Mark Bovens, (2007:67). Model ini menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi dalam kondisi keterbatasan akses.

Tabel Hasil 1. Penelitian Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif

Indikator Penelitian	Sebelum Mekanisme Partisipatif	Setelah Implementasi Mekanisme Partisipatif
Partisipasi Stakeholder	Partisipasi masyarakat masih terbatas, keputusan lebih bersifat top-down	Terjadi peningkatan keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah dan diskusi terbuka
Transparansi Informasi	Informasi kebijakan dan keputusan organisasi tidak sepenuhnya terbuka	Informasi disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan dan laporan sederhana
Proses Pengambilan Keputusan	Keputusan diambil oleh pimpinan organisasi dengan keterlibatan terbatas	Keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama antara pengelola dan pemangku kepentingan
Monitoring Program	Pengawasan program masih terbatas dan tidak sistematis	Monitoring dilakukan bersama oleh pengelola dan masyarakat
Evaluasi Program	Evaluasi dilakukan secara internal organisasi	Evaluasi dilakukan secara partisipatif melalui forum evaluasi bersama

Mekanisme pengambilan keputusan partisipatif memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sebelum penerapan mekanisme partisipatif, proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down dengan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Hal tersebut menyebabkan informasi mengenai kebijakan organisasi tidak sepenuhnya terbuka serta sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Namun setelah diterapkannya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif melalui forum musyawarah, diskusi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi bersama, terjadi peningkatan signifikan dalam keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta efektivitas pengawasan program. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat tata kelola organisasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. Hasil Analisis Data Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Skor Rata-rata Sebelum Implementasi	Skor Rata-rata Setelah Implementasi	Kategori Perubahan
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Keterlibatan masyarakat dalam forum keputusan	2,3	3,8	Meningkat
Transparansi Informasi	Keterbukaan akses informasi kebijakan	2,1	3,7	Meningkat
Proses Pengambilan Keputusan	Tingkat musyawarah dalam menentukan keputusan	2,5	3,9	Meningkat
Monitoring Program	Pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program	2,2	3,5	Meningkat
Evaluasi Program	Keterlibatan stakeholder dalam	2,0	3,6	Meningkat

 evaluasi program

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada tabel di atas, terlihat bahwa penerapan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif memberikan peningkatan pada seluruh indikator yang diteliti. Sebelum implementasi mekanisme partisipatif, tingkat partisipasi pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta monitoring dan evaluasi program masih berada pada kategori rendah dengan skor rata-rata berkisar antara 2,0 hingga 2,5. Setelah diterapkannya mekanisme pengambilan keputusan partisipatif melalui forum musyawarah, diskusi pemangku kepentingan, serta sistem monitoring dan evaluasi bersama, terjadi peningkatan skor rata-rata menjadi 3,5 hingga 3,9 yang menunjukkan kategori baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi pada kondisi keterbatasan akses.

Tabel 3. Indikator Variabel Penelitian dan Sumber Teori

Variabel Penelitian	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Teori
Mekanisme Pengambilan Keputusan Partisipatif	Keterlibatan pemangku kepentingan	Tingkat partisipasi masyarakat atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan	Ansell & Gash (2008:48)
	Forum musyawarah	Adanya forum dialog atau diskusi antara organisasi dan stakeholder	Fung (2015:14)
	Proses konsensus	Pengambilan keputusan dilakukan melalui kesepakatan bersama	Roberts (2004:21)
Transparansi	Keterbukaan informasi	Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program organisasi	Hood (2006:3)
	Publikasi keputusan	Penyampaian hasil keputusan kepada publik secara terbuka	Meijer (2013:30)
Akuntabilitas	Monitoring program	Proses pengawasan terhadap pelaksanaan program atau kebijakan	Bovens (2007:51)
	Evaluasi kinerja	Penilaian terhadap keberhasilan program dan pertanggungjawaban organisasi	Romzek & Dubnick (198: 228)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme partisipatif diukur melalui keterlibatan pemangku kepentingan, forum musyawarah, dan proses konsensus. Transparansi diukur melalui keterbukaan informasi dan publikasi keputusan, sedangkan akuntabilitas diukur melalui monitoring program dan evaluasi kinerja organisasi sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa peluang pengembangan kajian di masa depan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif pada berbagai wilayah dengan tingkat keterbatasan akses yang berbeda untuk memahami efektivitas mekanisme partisipatif secara lebih luas, Chris Ansell & Alison Gash (2008:75). Kedua, penelitian dapat mengkaji peran teknologi digital dalam mendukung partisipasi publik dan keterbukaan informasi, Albert Meijer, Deirdre Curtin, & Maarten Hillebrandt (2012:85). Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel seperti kepercayaan publik, kapasitas kelembagaan, dan kepemimpinan organisasi, Kirk Emerson, Tina Nabatchi, & Stephen Balogh (2012:70).

Keempat, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan metodologi yang lebih beragam, seperti metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara partisipasi pemangku kepentingan, transparansi informasi, dan akuntabilitas organisasi. Penggunaan metode campuran

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena tata kelola partisipatif dalam praktik, Creswell & Plano Clark (2018:75).

Kelima, penelitian di masa depan juga dapat mengkaji keberlanjutan implementasi mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dalam jangka panjang melalui studi longitudinal. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas berkembang seiring waktu serta bagaimana dinamika hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan berubah dalam proses tata kelola yang berkelanjutan, Bovens (2007:45). Dengan demikian, berbagai arah penelitian tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, khususnya pada organisasi atau wilayah yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan komunikasi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengambilan keputusan partisipatif dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam kondisi keterbatasan akses. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat proses pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat. Mekanisme partisipatif yang dilakukan melalui forum diskusi, musyawarah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program terbukti mampu mendorong transparansi dalam penyampaian informasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat keterbatasan akses informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat tetap dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola organisasi apabila didukung oleh komitmen kelembagaan serta penggunaan mekanisme komunikasi yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas organisasi, khususnya dalam konteks wilayah atau institusi yang menghadapi keterbatasan akses informasi dan komunikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemberi dana penelitian yang telah memberikan dukungan finansial sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut sangat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada instansi terkait, para informan penelitian, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa data, masukan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan akademisi dan pihak institusi yang telah memberikan saran, kritik, serta dukungan ilmiah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik serta praktik tata kelola organisasi yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, A. A., Chambers, L. M., Mulligan, D. K., & Jacobs, A. Z. (2024). Algorithmic transparency and participation through the handoff lens: Lessons from the U.S. Census Bureau's adoption of differential privacy. arXiv <https://doi.org/10.1145/3630106.3658962>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571 https://doi.org/10.1057/9780230582682_4
- Ballari, D., Siabato, W., Claramunt, C., Mata, F., Zagal, R., & Franco, R. (2025). On the development of open geographical data infrastructures in Latin America: Progress and challenges. arXiv <https://doi.org/10.5311/josis.2025.30.364>
- Birdayanthi, B., Yusriadi, Y., & Ikmal, I. (2024). Accountability and transparency in public administration for improved service delivery. *Journal Social Civilecial* <https://doi.org/10.29103/ijpas.v3i2.13890>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability. *European Law Journal*, 13(4), 447–468 <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663 <https://doi.org/10.1111/puar.12432>

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.)*. Sage Publications <https://doi.org/10.4135/9781071802823.n12>
- Dwitasari, K. A. (2024). Mengkaji perkembangan partisipasi warga negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 15–24 <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1072>
- Denzin, N. K. (2012). *The sage handbook of qualitative research*. Sage Publications <https://doi.org/10.4135/9781446247648.n30>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Florini, A. (2007). *The right to know: Transparency for an open world*. Columbia University Press. Memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel. Derajat kemutakhiran bahan yang diacu pada rentang 10 tahun terakhir. Daftar jumlah rujukan diharapkan 80% sumber primer yang berasal dari artikel riset nasional dan internasional. Minimal 15 referensi.
- Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522.
- Gantika, S. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam administrasi publik. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Grimmelikhuisen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The effect of transparency on trust in government. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586.
- Grimmelikhuisen, S., & Meijer, A. (2014). The effects of transparency on the perceived trustworthiness of government. *Public Administration Review*, 74(1), 137–143.
- Hood, C. (2010). Accountability and transparency. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(1), 989–1006.
- Irawati, S., Hayat, A., Juniar, A., & Handayani, S. A. (2023). Exploring accountability and transparency in government agency management: A literature review. *Illomata International Journal of Management*.
- Joshi, A., & Houtzager, P. (2012). Widgets or watchdogs? *Public Management Review*, 14(2), 145–162.
- Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi partisipasi masyarakat dalam public governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration*.
- Meijer, A. (2013). Understanding the complex dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.
- Nabatchi, T., Sancino, A., & Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77(5), 766–776.
- Nurmalasyiah. (2023). The influence of participatory leadership and budget transparency on public service accountability with community involvement as an intervening variable. *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences*.
- OECD. (2017). *Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Puangrimaggalatung, Z., & Amika, Z. R. (2025). Explaining public service quality at the village level: Administrative capacity, transparency, digitalization, and citizen participation. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*.
- Romzek, B., & Dubnick, M. (1987). Accountability in the public sector. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.
- Schedler, A. (2013). The politics of accountability. In *The Oxford Handbook of Mexican Politics*. Oxford University Press.
- Simanulang, L., & Pramudya, A. (2021). Public service innovation in enhancing government transparency and accountability. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Stoker, G. (2011). Was local governance such a good idea? A global comparative perspective. *Public Administration*, 89(1), 15–31.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). *Theories of democratic network governance*. Palgrave Macmillan.
- UNDP. (2015). *Governance for sustainable development: Integrating governance in the post-2015 development framework*. United Nations Development Programme.
- United Nations. (2023). *World public sector report 2023: Transforming institutions to achieve the sustainable development goals*.
- Vrabie, C. (2025). Improving municipal responsiveness through AI-powered image analysis in e-government.

arXiv.

World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank. Yang, K., & Pandey, S. K. (2011). Further dissecting the black box of citizen participation. *Public Administration Review*, 71(6), 880–892.